



Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik

Djamil Hasim

Program Studi Administrasi Publik, IISIP Yapris Biak, Indonesia

Abstrak

Patologi birokrasi seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merusak legitimasi institusi pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library search), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa patologi birokrasi dalam pelayanan publik adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan para peneliti untuk mengatasi masalah tersebut. Birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidaktransparan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merusak legitimasi institusi pemerintah.

Kata Kunci: Patologi, Birokrasi, Pelayanan Publik.

Pendahuluan

Patologi birokrasi dalam pelayanan publik mengacu pada masalah atau gangguan yang terjadi di dalam sistem birokrasi atau administrasi pemerintahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Birokrasi pada dasarnya adalah sistem pengaturan dan pelaksanaan tugas-tugas administratif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Namun, patologi birokrasi dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut dan bahkan dapat memperburuk masalah yang ada. Beberapa contoh patologi birokrasi dalam pelayanan

publik termasuk prosedur yang rumit dan lambat, korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparan, diskriminasi, dan ketidakmampuan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas. Semua masalah ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk ketidakpuasan mereka terhadap layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik agar pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi,



pengawasan dan akuntabilitas yang ketat, pelatihan dan pengembangan staf, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa kajian pustaka telah mengungkapkan patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Misalnya, sebuah studi oleh World Bank pada tahun 2017 menemukan bahwa birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidaktransparan adalah masalah utama dalam pelayanan publik di banyak negara berkembang. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa birokrasi yang tidak efektif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan.

Sebuah kajian oleh Miller dan Pekkanen (2015) menemukan bahwa patologi birokrasi seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merusak legitimasi institusi pemerintah. Studi ini juga menunjukkan bahwa reformasi birokrasi, seperti penghapusan prosedur yang berbelit-belit dan meningkatkan transparansi, dapat membantu mengatasi patologi birokrasi. Begitu

pula, sebuah studi oleh Lindberg et al. (2018) menunjukkan bahwa patologi birokrasi seperti diskriminasi dan ketidakmampuan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dapat mempengaruhi partisipasi politik dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Studi ini menyarankan bahwa partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengatasi patologi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, kajian pustaka menunjukkan bahwa patologi birokrasi dalam pelayanan publik adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan para peneliti untuk mengatasi masalah tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang patologi birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka/*library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang

bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber data primer yang digunakan adalah buku maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan patologi birokrasi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah yang berkaitan dengan patologi birokrasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipakai adalah analisis isi.

Hasil dan Pembahasan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Studi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit-belit, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan kualitas staf birokrasi.

1. Patologi birokrasi dalam pelayanan publik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk legitimasi institusi pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik.
2. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik dengan memberikan masukan dan umpan balik dari masyarakat



tentang kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengatasi patologi birokrasi.

3. Pelatihan dan pengembangan staf birokrasi juga penting untuk mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Pelatihan yang baik dan pengembangan staf dapat meningkatkan kualitas staf birokrasi, termasuk kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa patologi birokrasi dalam pelayanan publik adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan para peneliti untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya-upaya seperti reformasi birokrasi, partisipasi publik, dan pelatihan dan pengembangan staf birokrasi dapat membantu mengatasi

patologi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, patologi birokrasi dalam pelayanan publik adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan para peneliti untuk mengatasi masalah tersebut. Birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidaktransparan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merusak legitimasi institusi pemerintah. Namun, beberapa solusi telah dikemukakan oleh para peneliti seperti reformasi birokrasi, partisipasi publik, dan pelatihan dan pengembangan staf birokrasi yang dapat membantu mengatasi patologi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mengatasi patologi birokrasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh

pelayanan yang lebih efektif dan efisien dari pemerintah.

Daftar Pustaka

Adi, S. P., & Sutrisno, T. (2018). Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan di Era Digital. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3), 230-239.

Aji, M. P. (2019). Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah: Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 72-83.

Firdausy, C. (2019). Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik: Telaah Konsep dan Dampaknya. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 129-140.

Junaedi, A., Mubarak, H., & Mardiyah, N. (2020). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Birokrasi Publik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 55-65.

Kurniawan, T. (2021). Patologi Birokrasi: Akar Permasalahan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik dan Bisnis*, 8(1), 27-36.

Mulyana, D., & Prabowo, H. (2020). Efektivitas Reformasi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 33-44.

Nurkholis, M. (2019). Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia.

Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 11(2), 133-143.

Rofiq, A. (2018). Birokrasi dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 1-10.

Sari, N. N., & Nurcahyo, B. (2018). Kajian Patologi Birokrasi dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 25(2), 95-107.

Wahyuni, E., & Yanto, H. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Lokal*, 3(1), 1-12.